

**PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK PARTAI TERHADAP PERILAKU  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN  
BOTUPINGGE TAHUN 2024**

**Oleh:**

**RIAN S. RAHMOLA**

**NIM: S2121025**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**TAHUN 2025**

## **ABSTRAK**

**RIAN S. RAHMOLA.** NIM: S2121025. PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK PARTAI TERHADAP PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BOTUPINGGE TAHUN 2024. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Botupingge tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 37 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik partai berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Botu Pingge sebesar 0,731 atau 73,1%. Hal ini berarti bahwa komunikasi partai yang dilakukan partai politik dapat memberikan kontribusi pada perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah.

Kata kunci : komunikasi politik partai; perilaku pemilih; pemilihan kepala daerah.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.wb

Alhamdulillah robbil' alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang **“PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK PARTAI TERHADAP PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BOTUPINGGE TAHUN 2024”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapat tantangan dan juga hambatan, akan tetapi berkat bantuan, arahan, bimbingan bahkan dorongan dari bapak ibu dan dosen pembimbing, maka kesulitan maupun hambatan tersebut dapat terlewatkan. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada kedua orang tua, Ayahanda Amin Rahmola dan Ibunda Rosmawaty Pou yang telah mendidik dan membesarkan penulis. Dan juga tidak lupa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo; Ibu Dr.Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo; Bapak Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo; Bapak Purwanto, S.I.P., M.Si selaku Wakil Dekan I dan sekaligus sebagai penguji; Ibu Dwi Ratnasari, S.Sos., M.I.Kom, selaku Wakil Dekan II, Ibu Swastiani Dunggio, S.I.P., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan; Bapak Dr. Arman S.Sos, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini, dan Bapak Novaliansyah Abdussamad, MA sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun Skripsi. Serta para Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan penulis dalam perbaikan penulisan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Gorontalo, 12 Mei 2024

RIAN S. RAHMOLA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Komunikasi Politik .....	7
2.2 Teori Komunikasi Politik .....	10
2.3 Indikator Komunikasi Politik .....	12
2.4 Pengertian Perilaku Pemilih .....	15
2.5 Indikator Perilaku Pemilih.....	16
2.6 Partai Politik.....	18
2.7 Kerangka Berpikir.....	19
2.8 Hipotesis.....	21
<b>BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	23
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian .....	23
3.3 Operasionaisasi Variabel .....	24
3.4 Populasi dan Sampel.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26

3.6	Prosedur Penelitian.....	36
3.7	Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.1.1	Visi dan misi .....	30
4.1.2	Uraian tugas pokok.....	30
4.2	Hasil Penelitian.....	44
4.3	Deskripsi Variabel .....	47
4.3.1	Komunikasi politik partai .....	47
4.3.2	Perilaku pemilih.....	50
4.4	Hasil Uji Statistik .....	53
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1.	Kesimpulan .....	60
5.2.	Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kriteria Jawaban Responden.....	28
Tabel 4.1 Hasil uji validitas komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih..	45
Tabel 4.2 Hasil uji reliabilitas komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih .	46
Tabel 4.3 Tanggapan responden tentang komunikasi politik partai....	47
Tabel 4.4 Tanggapan responden tentang perilaku pemilih .....	50
Tabel 4.5 Model summary komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih..	53
Tabel 4.6 Koefisien komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih.....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Aktivitas politik dalam sebuah negara demokratis merupakan suatu proses yang penting untuk menjamin terlaksananya proses politik, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif dan dewan perwakilan daerah, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, dan lain-lain. Pemilihan umum sebagai salah satu bentuk mekanisme demokrasi memainkan peran yang penting dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Salah satu aspek kunci dalam proses pemilihan umum adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik. Komunikasi politik, menurut Nimmo (2017: 45), mencakup segala upaya yang dilakukan untuk memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku publik melalui pesan-pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat. Namun, komunikasi politik seringkali dianggap sebagai sebuah upaya pencitraan yang tidak substansial dan hanya berfungsi untuk memberikan janji politik yang tidak diwujudkan (Wring, 2020: 102).

Dalam banyak studi, komunikasi politik dianggap efektif ketika mampu membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan kesesuaian antara janji politik dengan implementasi kebijakan (Mulyana, 2019: 58). Akan tetapi, komunikasi politik yang cenderung manipulatif dapat menurunkan kredibilitas partai di mata masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada perilaku memilih masyarakat. Miller (2018: 34) menekankan bahwa citra politik yang terbentuk akibat komunikasi politik memiliki



dampak langsung terhadap persepsi publik tentang integritas dan kejujuran partai politik.

Menurut Surbakti (2021: 63) perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap partai politik, terutama dalam hal kepercayaan terhadap janji-janji yang disampaikan selama kampanye. Kepercayaan publik yang rendah, yang diakibatkan oleh ketidakkonsistenan antara janji politik dan kebijakan yang diimplementasikan, dapat menyebabkan partai politik kehilangan dukungan dari para pemilih (Kumolo, 2020: 89). Oleh karena itu, memahami bagaimana komunikasi politik partai dapat mempengaruhi perilaku pemilih menjadi hal yang esensial untuk mengkaji dinamika pemilu secara lebih komprehensif.

Perilaku politik individu juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Perubahan dalam nilai-nilai masyarakat, seperti transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dapat mengubah cara individu terlibat dalam politik. Nilai-nilai seperti kebebasan individu, partisipasi aktif, dan kesetaraan berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik. Bafadal (2024: 180) mengatakan bahwa kompleksitas perilaku pemilih, yang dipengaruhi oleh tradisi lokal, identitas sosial, dan teknologi modern, membutuhkan pendekatan historis, filosofis, dan normatif yuridis untuk memahami dinamika yang terjadi. Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih inklusif dan berorientasi pada penguatan demokrasi lokal.

Dalam konteks pemilih muda, Fitriyah, dkk (2021) mengatakan bahwa adanya antusiasme pemilih muda untuk menggunakan hak pilih di TPS kuat namun belum diimbangi dengan tingkat pengetahuan yang cukup untuk menjadikan mereka sebagai pemilih cerdas. Oleh sebab itu peran penyelenggara pemilu untuk lebih memberi perhatian pada kategori pemilih muda diperlukan. Dalam hal ini terdapat sejumlah agen sosialisasi yang sesuai kebutuhan mereka, dalam bentuk kontak personal sebagai agen adalah tokoh agama dan agen berikutnya untuk sosialisasi adalah media massa. Studi ini juga menemukan media sosial sebagai agen sosialisasi baru yang juga dipercaya oleh pemilih muda. Posisi media sosial saat ini sebagai pelengkap media massa cetak dan elektronik.

Perilaku politik juga dapat dipengaruhi oleh pendekatan generasi terhadap isu-isu sosial dan politik. Generasi milenial dan Gen Z cenderung lebih fokus pada isu-isu seperti keadilan sosial, perubahan iklim, dan hak asasi manusia dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menciptakan pergeseran dalam strategi kampanye politik, di mana kandidat harus dapat beradaptasi dengan nilai-nilai dan kepentingan yang dipegang oleh pemilih muda. Pemilih yang lebih muda ini menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam aktivisme dan gerakan sosial, menggunakan platform media sosial untuk menyuarakan pendapat dan mengorganisir aksi kolektif yang menuntut perubahan.

Dalam suatu sistem politik yang demokratis, terdapat subsistem suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dan subsistem infrastruktur politik (partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, dll). Proses politik berkenaan dengan proses input dan output sistem politik. Dalam model komunikasi politik, bahwa komunikasi politik model input merupakan proses opini berupa gagasan, tuntutan, kritikan, dukungan mengenai suatu isu-isu aktual yang datang dari infrastruktur ditujukan kepada suprastruktur politiknya untuk diproses menjadi suatu keputusan politik (berupa undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, dan sebagainya). Sedangkan komunikasi politik model output adalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan keputusan politik dari suprastruktur politik kepada infrastruktur politik dalam suatu sistem politik. Sebagai proses politik, komunikasi berperan menghubungkan bagian-bagian dari sistem politik.

Pada saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen dan partai politik sangatlah rendah. Ini membuktikan bahwa fungsi partai politik sebagai komunikator politik tidak efektif. Artikel ini akan menggunakan dan mengelaborasi berbagai regulasi dan teori yang berhubungan dengan aspek demokrasi dan partisipasi publik untuk menganalisis permasalahan mengenai tidak efektifnya fungsi partai politik sebagai komunikator politik. Hasil akhir dari penelitian ini adalah terdapat solusi hukum yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik, khususnya dalam proses rekrutmen politik. Di Kecamatan Botu Pingge, partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik, masih diwarnai dengan adanya kegiatan

mobilisasi warga atau bahkan money politik. Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, bapak Alfian Kasim (wawancara, Rabu 2 April 2025) mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya tertarik pada kegiatan politik karena setiap ada kegiatan politik, pada umumnya kalau ada kumpul-kumpul yang menjadi pokok pembahasan yakni politik. Namun, perilaku politik masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam setiap proses politik masih rendah karena kurang adanya pemahaman tentang posisi mereka dalam konteks pemilu. Hal ini juga banyak disebabkan kurangnya sosialisasi dari partai politik sebagai organisasi yang mencalonkan kadernya untuk menjadi calon anggota legislatif dan kepala atay wakil kepala daerah.

Asshiddiqie (2018) mengatakan bahwa partai politik pada hakikatnya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dalam sistem demokrasi. Partai politik memegang peran yang penting dalam sistem demokrasi karena partai politik menjadi penghubung antara pemerintahan negara (state) dan warga negaranya. Partai politik merupakan pilar penting dalam setiap sistem politik yang demokratis. Terdapat pandangan skeptis mengenai partai politik yang menyatakan bahwa partai politik hanya menjadi kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa untuk memuaskan hasrat kekuasaannya sendiri. Pandangan tersebut melihat partai politik hanya berfungsi sebagai alat bagi orang-orang yang memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komunikasi Politik Partai Terhadap Perilaku Pemilih di Kecamatan Botu Pingge”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Seberapa besar pengaruh komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih di Kecamatan Botu Pingge?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh komunikasi politik partai terhadap Perilaku pemilih di Kecamatan Botu Pingge.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi politik dapat mempengaruhi persepsi publik dan keputusan pemilih dalam pemilihan umum. Hal ini bermanfaat bagi partai politik dalam merancang kampanye yang lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi akademisi, praktisi politik, dan konsultan kampanye untuk mengembangkan komunikasi politik yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi informasi, khususnya dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang interaktif dan efisien.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Komunikasi Politik**

Komunikasi adalah cara untuk membuat perubahan sosial dalam hal proses sosial. Komunikasi berperan dalam mengisi perbedaan sosial. Karena akan memfasilitasi untuk melakukan perubahan. Namun, komunikasi juga tidak terpisah dari konteks sosialnya. Ini berarti bahwa itu diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, norma dan institusi manusia. Jadi keduanya saling mempengaruhi dan melengkapi bagaimana hubungan manusia dan sosial saling melengkapi.

Komunikasi politik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, adalah ekspresi yang terdiri dari dua "komunikasi" dan "politik." Setelah menggabungkan kedua kata, seperti yang dijelaskan oleh para ahli, itu menjadi pemahaman yang lebih luas. Menurut MC Nair, yang dikutip oleh Hafied Cangara komunikasi politik berbicara tentang alokasi sumber daya publik, apakah itu pegawai negeri sipil yang diizinkan untuk membuat kekuasaan dan keputusan untuk menentukan nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, hukum atau peraturan, apakah itu adalah undang -undang, hukum, pemimpin, atau pelayan publik yang diizinkan untuk menentukan undang -undang atau peraturan yang tidak dilaksanakan.

Komunikasi politik kemudian digunakan oleh orang -orang yang terlibat dalam politik negara untuk membangun hubungan dengan kelompok atau orang tertentu atau orang -orang dalam konteks yang lebih besar. Oleh karena itu, proses pencapaian

tujuan komunikator dapat mencapai apa yang seharusnya. Di bawah kondisi di atas, saluran komunikasi biasanya digunakan dalam media massa dalam bentuk pertemuan umum, konferensi pers, dll. Nah, kami baru-baru ini memberikan contoh sederhana kandidat orang yang semakin terkonsentrasi, menggunakannya untuk keuntungan atau kekuatan mereka dengan berkomunikasi dan "penutupan" dan "menutup" mereka, dan memberikannya kepada media massa untuk mendapatkan "anggukan" secara umum. Dalam konteks seperti itu, komunikasi melibatkan komunikasi politik dengan setiap gaya retorika, yang digunakan oleh perwakilan orang potensial.

Proses politik terkait dengan proses input dan output dari sistem politik. Model komunikasi politik menggambarkan model input komunikasi politik sebagai prosedur opini dalam bentuk ide, tuntutan, tuntutan, kritik dan dukungan dalam hal topik aktual yang timbul dari topik nyata (seperti hukum, peraturan pemerintah, keputusan keputusan) yang timbul dari infrastruktur yang menargetkan struktur politik. Sedangkan komunikasi politik model output adalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan-keputusan politik dari suprastruktur politik kepada infrastruktur politik dalam suatu sistem politik. Sebagai proses politik, komunikasi berperan menghubungkan bagian-bagian dari sistem politik. Gabriel Almond dalam Alfian (2014) mengibaratkan komunikasi sebagai aliran darah yang mengalirkan pesan-pesan politik yang berupa tuntutan, protes, dukungan ke jantung pemrosesan sistem politik.

Pesan politik dan komunikasi komunikasi politik memengaruhi aktor politik dan kedutaan dalam kaitannya dengan kekuatan pemerintah, pemerintah dan politik.

Komunikasi politik bukanlah hal baru dalam pemahaman ini sebagai sains terapan. Komunikasi politik juga dapat dipahami sebagai komunikasi antara "penguasa" dan "pemerintahan." Menurut Almond dan Kamaruddin (2015:6), komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu termasuk dalam semua sistem politik.

Unsur membahas mengenai komunikasi politik yang penjelasannya melingkupi pengertian dan konsep komunikasi politik seperti komunikator politik, pesan politik, saluran dan media komunikasi politik, khalayak politik dan efek komunikasi politik. Penjelasan diperlengkap lengkap dengan bahasan tentang sistem politik, retorika dan politik, opini publik, kampanye politik dan iklan, pemasaran politik, public relations politik, penelitian politik dan peran media (Old & New Media) dalam Komunikasi politik (Kamaruddin, 2015:6-7).

Berkaitan dengan komunikasi sebagai proses politik, Oliver Garceau dalam Nimmo (2017) menulis tentang proses politik sebagai pola interaksi yang berganda, setara, bekerja sama, dan persaingan yang menghubungkan warga negara partisipan yang aktif dalam posisi utama pembuat keputusan. Serupa dengan Garceau, Nurudin (2014) menyatakan sebagai proses politik, komunikasi menjadi alat yang mampu mengalirkan pesan politik (tuntutan dan dukungan) ke kekuasaan untuk diproses. Proses itu kemudian dikeluarkan kembali dan selanjutnya menjadi umpan balik (feedback).

## **2.2. Teori Komunikasi Politik**

Teori Komunikasi Politik Teori dasar dari aplikasi komunikasi politik adalah



- 1) Teori khalayak kepala batu : Teori ini mengkaji mengenai faktor-faktor yang membuat individu dapat menerima pesan-pesan komunikasi. Salah satunya adalah lahirnya teori atau model guna dan kepuasan. Kemudian Teori ini dikembangkan oleh ellihucu model ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang sangat rasional dan sangatlah aktif dinamis serta selektif terhadap semua pengaruh dari luar dirinya. Khalayak yang selektif itu akan memilih berdasarkan kegunaan dalam memenuhi kepuasan dirinya.
- 2) Teori empati dan teori hemofili Teori empati dikembangkan oleh berlo dan Daniel learner, kemudian teori hemofili diperkenalkan oleh Everett M.Rogers, dan F. Shoemaker.

Teori ini merupakan penjabaran dari Paradigma interaksional menurut Daniel learner, empati adalah suatu kesanggupan seseorang melihat dirinya sendiri masuk ke dalam situasi orang lain dan kemudian melakukan suatu penyesuaian. kemudian istilah homofili memiliki arti bahwa berkomunikasi dengan orang yang sama artinya derajat orang yang berkomunikasi memiliki kesamaan dalam beberapa hal hemofili ini dapat digambarkan sebagai suasana atau kondisi kepribadian dan kondisi fisik antara dua orang yang berinteraksi ketika memiliki kebersamaan usia, bahasa, pengetahuan, kepentingan partai, organisasi, agama, Suku bangsa, serta pakaian. Tetapi dalam hal ini bisa menjadi sulit terjadi interaksi yang intensif jika dua orang yang berinteraksi bersifat heterofili, artinya tidak memiliki kesamaan bahasa,

pengetahuan serta kepentingan. Dari adanya empati dan hemofili ini akan menciptakan suatu bentuk keakraban dan intim sehingga komunikasi politik dapat berjalan secara interaksional dalam hal ini Interaksi dapat terjadi antara dua subjek yang selevel dan sederajat. Dalam komunikasi politik yang bersifat dialogis tidak dikembangkan kata aku dan kamu, melainkan yang ditonjolkan adalah kata kita.

Menurut Harold Lasswell (1948) : Model komunikasi politik Lasswell melibatkan lima elemen utama: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect.

1. Komunikator

2. pesan

3. saluran

4. audiens

5. efek

### **2.3. Indikator Komunikasi Politik**

Kamaruddin (2015:36) mengatakan terdapat lima unsur komunikasi politik, yakni:

1) Komunikator Politik

Komunikasi politik dapat dibedakan dalam bentuk individu, lembaga, atau dalam bentuk koleksi banyak atau banyak orang. Dengan cara ini, kadang -kadang

dapat dilihat sebagai sumber individu. Sedangkan pada kesempatan lain, memang secara jelas dapat dibedakan bahwa meskipun seseorang individu yang berbicara, tetapi ia menjurubicarai suatu lembaga atau organisasi, maka pada saat itu dapat dipandang sebagai sumber kolektif. Setiap orang dapat berkomunikasi melalui politik, tetapi orang-orang yang melakukannya selamanya dan secara terus menerus relatif kecil. Namun, komunikator politik ini memainkan peran sosial yang paling penting, terutama dalam proses opini publik. dan Dimmo (1989) mengkategorikan komunikator terpenting dalam politik sebagai berikut: politisi. Profesional dan aktivis.

## 2) Pesan Politik

Pesan adalah komponen komunikasi yang harus tersedia sehingga konten komunikasi atau konten dilakukan dengan benar dalam arti bahwa proses komunikasi memilikinya. Pesan adalah dimensi konten (konten) komunikasi yang dikatakan. Meskipun pesan komunikasi tidak hanya diucapkan secara verbal, mereka juga dapat disajikan dalam berbagai bentuk kemasan nonverbal. Mulyana Dalamuddin (2015:44) menjelaskan bahwa dimensi konten merujuk pada berita komunikasi. Pesan komunikasi juga terkait dengan proses proses dan kemungkinan menyediakan pesan. Ini berarti bahwa ada hubungan antara berita atau konten komunikasi dengan komponen lain seperti saluran dan media komunikasi.

### 3) Media Komunikasi Politik

Saluran komunikasi politik dapat berfungsi sebagai sumber/komunikator di satu saat, tetapi pada waktu tertentu lebih berfungsi sebagai saluran atau media, dan pada waktu yang lain berfungsi sebagai keduanya. Kegandaan fungsi itu bukanlah sesuatu yang aneh karena suatu pihak dalam berlangsungnya proses komunikasi memang tergantung dari mana kita akan meninjaunya.

Aktor utama dalam demokrasi modern adalah media massa. Di sebagian besar masyarakat di mana media menggunakannya sebagai sarana untuk memperoleh informasi, agenda pengaturan media memiliki dampak besar. Komunitas memutuskan keputusan dan keputusan politiknya berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media. Nilai media massa yang paling jelas (radio, surat kabar, majalah, televisi, dll.) Adalah opsi untuk menjangkau jumlah pemirsa yang tidak terbatas. Menurut Chaffe of Kamaruddin (2015:61), media massa mendukung tidak hanya penambahan komunikasi interpersonal, tetapi juga pertumbuhan politik pada orang dan lembaga, tetapi pada akhirnya ditentukan apakah pengguna media sendiri berpengaruh, tetapi pada akhirnya ditentukan apakah pengguna media sendiri tidak.

### 4) Khalayak (audiens) Komunikasi Politik

Menurut pemahaman yang umum digunakan dalam komunikasi, partai yang menyampaikan mediasi pesan disebut penerima (penerima), audiens, atau komunikasi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa penonton sebenarnya hanyalah

peran sementara. Ketika penerima pesan memperkenalkan pesan berikutnya dengan kurva berikutnya, maka pada saat itu sebenarnya pihak yang tadinya disebut sebagai khalayak itu telah berubah peran menjadi komunikator.

Memang dapat dipahami mengapa partisipasi khalayak yang ideal itu masih sangat sedikit ditemukan pada masyarakat-masyarakat negara yang baru tumbuh. Karena itu untuk sampai pada keadaan khalayak ideal yang dimaksud, lebih dahulu harus dipenuhi berbagai persyaratan. Di antara faktor yang menentukan adalah, tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tahap pendidikan yang dicapai, pengenalan media, dan tentunya keadaan sosial masyarakat sendiri dalam arti apakah terdapat iklim social yang mendorong mereka menjadi ingin tahu dan ikut serta dalam gerak\perkembangan politik dan pemerintahan. Selanjutnya, berkenaan dengan kompetensi demokrasi seorang anggota masyarakat yang berkaitan erat dengan dipunyainya informasi yang valid tentang isu-isu dan proses- proses politik. Setelah mempunyai informasi, para warga negara pun harus berkemampuan untuk menggunakan informasi yang dimaksud guna menganalisis isu-isu yang dihadapi dan memperangkati strategi-strategi pengaruh mereka dalam proses politik yang berlangsung.

#### 5) Efek atau Umpan Balik

Proses komunikasi umumnya disebut sebagai pengaruh atau efek komunikasi. Efek komunikasi adalah perubahan yang terjadi pada penerima pesan komunikasi. Efek dan umpan balik adalah bentuk pengetahuan tentang sesuatu. Pesan komunikasi

memberikan informasi dan fakta yang memenuhi pemikiran/ide Anda sendiri. Mungkin juga terkait dengan pengaturan. Pesan komunikasi terkait dengan perilaku perilaku yang mengubah emosi/emosi dibandingkan dengan sesuatu. Pesan komunikasi merangsang atau mengarahkan keinginan untuk melakukan/melakukan sesuatu.

#### **2.4. Pengertian Perilaku Pemilih**

Perilaku pemilih adalah pola atau kecenderungan seseorang dalam mengambil keputusan politik, terutama dalam hal memberikan suara dalam pemilu. Perilaku ini mencerminkan bagaimana individu memutuskan kandidat atau partai politik yang akan didukung berdasarkan berbagai faktor psikologis, sosiologis, dan politis.

Menurut Niemi dan Weisberg (2001)"Perilaku pemilih adalah proses yang melibatkan keputusan individu dalam memilih atau tidak memilih kandidat atau partai tertentu pada pemilu, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan politik."

Menurut Campbell et al. (1960) "Perilaku pemilih mencerminkan identifikasi partai, preferensi kandidat, serta pengaruh isu-isu tertentu yang memengaruhi pilihan politik."

Menurut Higashikata & Kawamura (2015) menyimpulkan bahwa "aliran politik" telah hilang karena perubahan perilaku memilih namun tetap berpengaruh kuat dalam orientasi keagamaan (Higashikata & Kawamura,

2015). Sedangkan Liddle & Mujani (2007) dalam *Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior*.

## **2.5. Indikator Perilaku Pemilih**

Menurut Surbakti (1997), perilaku memilih adalah aktivitas individu yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Perilaku warga juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam memutuskan keputusannya yang dipengaruhi oleh faktor kesamaan atau kecenderungan.

Menurut Arifin (2014), ada lima perilaku yang dilakukan pemilih saat memilih pada saat pemilu. Perilaku tersebut antara lain:

- a. Jenis yang wajar, adalah jenis warga negara dengan sikap yang wajar bagi kepribadian setiap pemilih yang juga memilih keputusan yang berpihak pada individu.
- b. Tipe reseptif, adalah tipe pemilih yang memiliki kedekatan mendalam dengan pesaing atau kelompok ideologis tertentu
- c. Tipe responsif, adalah tipe pemilih yang bergantung pada keadaan dan kondisi seperti waktu, peristiwa politik, dan keadaan politik yang sedang berlangsung.
- d. Pemilih tipe aktif memaknai peristiwa, isu politik, dan partai politik dengan membentuk, menyusun, dan menerima semua pilihan berdasarkan perhitungan opsi yang ada.

- e. Pemilih tipe transaksional memilih dari berbagai pilihan yang ada berdasarkan transaksi yang melibatkan hadiah atau fasilitas.

Menurut Plano dari Rachmat dan Esther (2016:27), tindakan dapat dipahami sebagai pikiran atau tindakan manusia yang terkait dengan proses pemerintah. Dalam hal ini, tindakan politik termasuk jawaban internal (pemikiran, persepsi, sikap, kepercayaan) dan perilaku yang terlihat (penyesuaian, protes, lobi, kampanye). Oleh karena itu, tindakan tidak hanya ditafsirkan sebagai pikiran atau jawaban abstrak. Namun, serta tindakan aktor politik tertentu.

## **2.6. Partai Politik**

Partai politik merupakan lembaga politik yang legal sebagai peserta pemilu yang berkewajiban menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan dapat dengan konsisten menjunjung kepentingan rakyat dengan selalu berpedoman dengan ideologi partai politik tempat ia bernaung. Partai merupakan alat untuk memperkenalkan nilai ideologi dan kesetiaan kepada partai dan negara. Dalam rekrutmen politik, partai dapat mengajak orang-orang pilihan untuk bergabung dalam partai politik. Dalam aktivitas politiknya, partai politik hendaknya berfungsi sebagai sarana pendidikan politik untuk masyarakat agar mereka dapat memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat.

Friedrich dalam Budiardjo (2019: 161) menyatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini



akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealism maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya. Dan Soltau dalam Budiardjo (2019:161) mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Peran partai politik sebagai penyandang fungsi sosialisasi, pendidikan, partisipasi dan rekrutmen politik merupakan media yang sangat efektif dalam memicu partisipasi politik rakyat daerah. Terpaan pendidikan politik dari berbagai agen dalam pilkada yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada kontribusi partisipasi politik yang baik pula. Peran partai politik yang melakukan penjarinag calon pasangan dengan obyektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat dalam menentukan pimpinan politik daerah, akan menarik minat rakyat daerah untuk berperan serta. Di samping itu, peran KPUD dalam sosialisasi tahapan pilkada langsung juga berpengaruh pada tingkat partisipasi politik dalam pilkada langsung ini.

Partai Politik (parpol) menurut Budiardjo (2019) merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di negaranegara berkembang maupun negara-negara maju parpolmenjadi ikhtiar yang penting dalam sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur.

## **2.7. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir mengenai pengaruh komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih dimulai dengan pemahaman bahwa komunikasi politik memainkan peran penting dalam proses pemilu. Komunikasi politik, yang mencakup penyampaian pesan melalui berbagai saluran seperti media massa, media sosial, dan pertemuan publik, berfungsi untuk membentuk persepsi dan sikap pemilih terhadap partai politik.

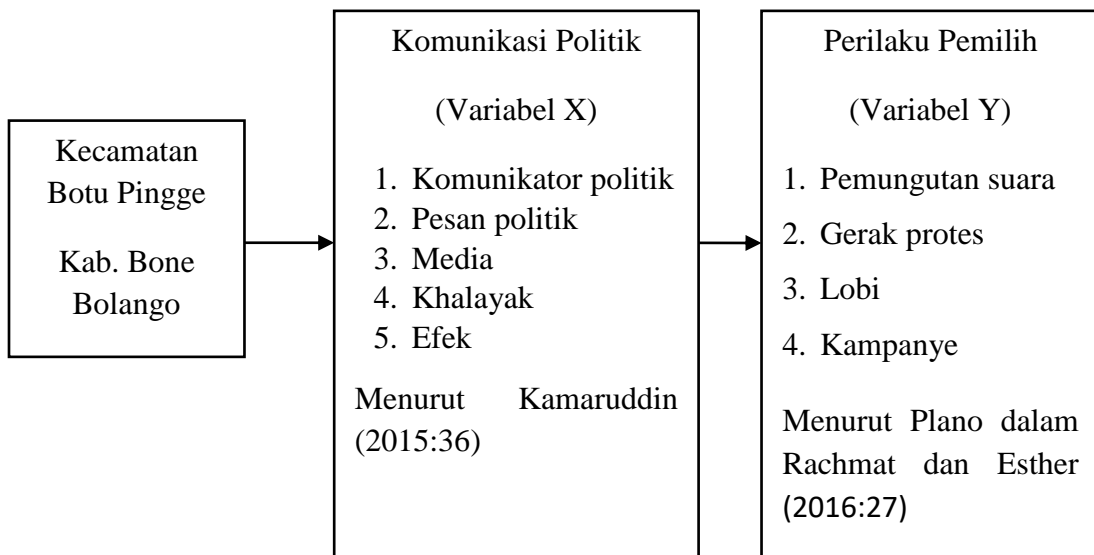
Pada dasarnya, komunikasi politik berfungsi sebagai variabel independen yang mempengaruhi perilaku pemilih, yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Dengan kata lain, cara partai politik menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Misalnya, strategi komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap partai, mendorong keterlibatan mereka dalam proses pemilu, dan memotivasi mereka untuk memberikan suara.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memoderasi dan memediasi hubungan antara komunikasi politik dan perilaku pemilih. Latar belakang sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan pengetahuan politik pemilih dapat mempengaruhi bagaimana mereka menerima dan menanggapi pesan komunikasi. Di sisi lain, sikap pemilih terhadap partai dan kepercayaan mereka pada pesan yang disampaikan juga berfungsi sebagai mediator yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh komunikasi politik.

Metodologi penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan ini mungkin meliputi desain penelitian kuantitatif atau kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui survei atau wawancara. Analisis data akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana komunikasi politik partai mempengaruhi perilaku pemilih.

Kesimpulannya, kerangka berpikir ini menyoroti pentingnya komunikasi politik dalam membentuk perilaku pemilih, serta berbagai faktor yang terlibat dalam proses tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi partai politik dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menarik pemilih.

Tabel 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran



## **2.8. Hipotesis**

Hipotesis menurut Ridwan (2018:35) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya.

Berdasarkan Permasalahan penelitian dan teori pendukung, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Botu Pingge.

### **BAB III**

#### **OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

##### **3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, demi tercapainya suatu penelitian yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bone Bolango. Tepatnya, penelitian ini lebih difokuskan pada wilayah yang tingkat partisipasinya tinggi pada pemilihan Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yaitu di Kecamatan Botu Pingge.

##### **3.2. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan alasan karena penelitian ini berupaya untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Komunikasi Politik Terhadap Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Botu Pingge. Dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dapat memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin. Adapun metode penelitian ini adalah metode survey. Creswell (2020) menyatakan bahwa metode survei adalah pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar orang dengan cara yang terstruktur.

### **3.3. Operasionalisasi Variabel**

Untuk memudahkan penelitian, semua variabel penelitian harus terlebih dahulu harus dibautkan definisi operasionalnya. Komunikasi politik partai ialah proses penyampaian pesan politik dan aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah, dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah. Menurut Kamaruddin (2015:36) terdapat lima unsur komunikasi politik, yakni:

- a) Komunikator politik ialah proses penyampaian pesan politik yang dilakukan kader partai atau pimpinan partai dengan tujuan untuk membentuk opini masyarakat untuk ikut menyukseskan proses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah.,
- b) Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan oleh partai politik, baik dalam bentuk tertulis, dengan tujuan dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam proses pemilihan kepala daerah.
- c) Media ialah saluran komunikasi yang dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk masyarakat tentang proses pemilihan kepala daerah.
- d) Khalayak ialah pihak yang menjadi tujuan penyampaian yang dapat merubah perilaku politik masyarakat.

- e) Efek ialah proses komunikasi menimbulkan pengaruh pada perilaku pemilih dalam proses pemilihan kepala daerah.

Perilaku pemilih ialah pikiran atau tindakan politik pemilih yang berkaitan dengan keputusan pemilih untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Plano dalam Rachmat dan Esther (2016:27) mengatakan perilaku politik pemilih dapat berupa:

1. Pemungutan suara ialah keikutsertaan pemilih dalam pemberian suara pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
2. Gerak protes ialah keikutsertaan pemilih dalam kegiatan protes karena terdapat pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah.
3. Lobi ialah keikutsertaan pemilih dalam melakukan penawaran politik pada proses pemilihan kepala daerah.
4. Kampanye ialah keikutsertaan pemilih dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon kepala daerah yang didukungnya.

### **3.4. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yakni warga masyarakat Kecamatan Botu Pingge yang memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala dan wakil daerah di Kabupaten Bone Bolango.

Oleh karena populasi dalam penelitian ini besar, maka peneliti melakukan sampling wilayah, yakni Desa Timbuolo Tengah (desa yang memiliki daftar pemilih terbanyak di Kecamatan Botu Pingge) dan Desa Sukma (desa yang memiliki daftar

pemilih paling sedikit di Kecamatan Botu Pingge). Setelah itu, digunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penarikan sampel dengan sengaja dan bersedia untuk menjawab kuesioner yang diberikan, yaitu orang yang memiliki hak suara di Desa Timbuolo Tengah yakni 20 orang, dan Desa Sukma sebanyak 17 orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan sampel sebanyak 37 orang.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) menggunakan bentuk checklist. guna membantu responden di Kecamatan Botu Pingge untuk menjawab dan mengisi kuesioner dengan mudah dan cepat dengan memberi tanda check (✓) pada tempat yang telah disediakan. Peneliti membuat 2 (dua) buah kuesioner untuk penelitian ini, satu kuesioner untuk memperoleh data terkait Komunikasi Politik (variabel X) dan satu kuesioner untuk memperoleh data terkait Perilaku pemilih (variabel Y). Kedua kuesioner tersebut peneliti berikan kepada masyarakat atau responden yang berada di Kecamatan Botu Pingge. Guna mempermudah proses pembuatan kuesioner, maka terlebih dahulu peneliti membuat kisi-kisi instrumen penelitian. Kuesioner dilengkapi dengan skala pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif. Skala Likert digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi masyarakat atau responden tentang variabel komunikasi politik dan variabel perilaku pemilih Ada 5 (lima) pilihan jawaban pada setiap item pertanyaan, yaitu:

- a) Jawaban Sangat Setuju (SS) : diberi skor 4
- b) Jawaban Setuju (S) : diberi skor 3



c) Jawaban Tidak Setuju (TS) : diberi skor 2

d) Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS): diberi skor 1

Kuesioner penelitian yang dibuat oleh peneliti ini akan diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dan sesudah penelitian. Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan/ kevalidan kuesioner penelitian, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kehandalan/ konsistensi kuesioner penelitian. Peneliti akan melakukan uji validitas dengan menggunakan bantuan software SPSS version 21.0. Pengujian validitas cukup dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel Product Moment (Jika nilai rhitung  $\geq$  rtabel maka indikator atau pertanyaan kuesioner dikatakan valid, begitupula sebaliknya. Data juga dikatakan valid jika nilai sig. (2-tailed) data  $< 0.05$  Peneliti akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan software SPS version 21.0. Pengujian realibilitas cukup dengan membandingkan ralpha atau angka cronbach alpha dengan nilai 0,7. Jika ralpha atau angka cronbach alpha  $\geq 0,7$  maka indikator atau pertanyaan kuesioner dikatakan reliabel, begitupula sebaliknya.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu:

#### **3.6.1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif**

Teknik analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data kuesioner yang telah terkumpul dari jawaban responden pada Kecamatan Botu Pingge

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (generalisasi).

Teknik analisis statistik deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa tabel, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase (%). Penentuan persentase dari perolehan data hasil kuesioner dari masing-masing variabel menggunakan rumus perhitungan persentase:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan rumus:

n = Skor yang diperoleh

N = Skor ideal

% = Persentase

Data yang sudah dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat-kalimat yang bersifat kualitatif, dimana hasil persentase itu dapat digolongkan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5:

Tabel 3.1 Kriteria Jawaban Responden

Persentase Jawaban	Tafsiran Kualitatif
80% - 100%	Sangat Baik
60% - <80%	Baik
40% - <60%	Cukup Baik
20% - < 40%	Kurang Baik
0% - < 20%	Sangat Tidak Baik

(Sugiono, 2010)

### 3.6.2. Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana

Teknik analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat besaran pengaruh variabel komunikasi politik terhadap variabel perilaku pemilih pada masyarakat Kecamatan Botu Pingge. Digunakan pula untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (prediction). Adapun rumus persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

$$\hat{Y} = a + b X$$

Keterangan rumus:

$\hat{Y}$  = variabel perilaku pemilih

X = variabel komunikasi politik

a = konstanta

b = koefisien regresi

Analisis regresi dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan software SPSS version 21.0. Hasil analisis regresi dapat digunakan pula untuk melakukan uji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Dasar pengambilan keputusannya, adalah:

a. Jika nilai P value (sig)  $\geq 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak b. Jika nilai P value (sig)  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Karakteristik Masyarakat**

Kecamatan Botupingge merupakan salah satu daerah penghasil kelapa yang ada di Provinsi Gorontalo. Produktivitas kelapa yang melimpah memiliki potensi pengembangan ekonomi lokal yang sangat menjanjikan, tetapi masyarakat masih mengalami kendala. Secara administratif, Kecamatan Botupingge, terdiri dari 9 desa definitif. Dari semua desa di Kecamatan Botupingge, terdapat 9 desa yang merupakan desa swadaya, 0 desa swakarya, dan 0 desa swasembada. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Desa Timbuolo dengan persentase jumlah penduduknya sebesar 15,78%. Sedangkan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Luwohu dengan kepadatan penduduknya sebesar 2376,67 jiwa per km<sup>2</sup>.

Kecamatan Botupingge, memiliki sejumlah fasilitas sekolah, diantaranya yaitu, 3 bangunan Sekolah Dasar, 01 bangunan MI, 1 bangunan Sekolah Menengah Pertama, 1 bangunan MTs, 0 bangunan Sekolah Menengah Atas, 1 bangunan MA, 1 bangunan Sekolah Menengah Kejuruan, dan 1 Perguruan Tinggi. Secara umum, di Kecamatan Botupingge, tempat sekolah dasar/ sederajat dapat diakses dengan sangat mudah, tempat sekolah menengah pertama/sederajat dapat diakses dengan sangat mudah, tempat sekolah menengah atas/sederajat dapat diakses dengan sangat mudah, dan tempat perguruan tinggi dapat diakses dengan sangat mudah. Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Botupingge, adalah terdiri dari, 0 rumah sakit umum/khusus, 0 rumah sakit bersalin, 1 poliklinik, 0 pusat kesehatan masyarakat dengan rawat inap, 1 pusat kesehatan masyarakat tanpa rawat inap, dan 0 apotek.

Kecamatan Botupingge, memiliki sejumlah fasilitas sekolah, diantaranya yaitu, 3 bangunan Sekolah Dasar, 01 bangunan MI, 1 bangunan Sekolah Menengah Pertama, 1 bangunan MTs, 0 bangunan Sekolah Menengah Atas, 1 bangunan MA, 1 bangunan Sekolah Menengah Kejuruan, dan 1 Perguruan Tinggi. Secara umum, di Kecamatan Botupingge, tempat sekolah dasar/ sederajat dapat diakses dengan sangat mudah, tempat sekolah menengah pertama/sederajat dapat diakses dengan sangat mudah, tempat sekolah menengah atas/sederajat dapat diakses dengan sangat mudah, dan tempat perguruan tinggi dapat diakses dengan sangat mudah. Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Botupingge, adalah terdiri dari, 0 rumah sakit umum/khusus, 0 rumah sakit bersalin, 1 poliklinik, 0 pusat kesehatan masyarakat dengan rawat inap, 1 pusat kesehatan masyarakat tanpa rawat inap, dan 0 apotek.

#### **4.1.2. Uraian tugas pokok**

Susunan organisasi Kecamatan Botu Pingge mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Bone Bolango, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi PMD;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka dalam pasal Perda tersebut, Kecamatan Botu Pingge merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah, secara umum, sebagai berikut :

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan
- d. Mengkoordinasikan pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.

#### 1. Camat

##### 1) Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, ketentraman dan ketertiba, pelayanan umum, dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat Kecamatan;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. Membina, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan kelurahan yang ada diwilayahnya;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan program kerja dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, ketentraman dan ketertiban, pelayanan umum, dan pelayanan administrasi;

- e. Melaksanakan koordinasikan dengan semua instansi baik pemerintahan maupun swasta serta instansi vertikal yang ada diwilayah Kecamatan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- f. Membina dan memotifasi serta memelihara terus menerus kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Kecamatan guna meningkatkan produktivitas kerja;
- g. Mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan/rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh kepala daerah;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Kecamatan secara teknis operasional dan teknis administrasi kepala daerah melalui Sekretaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah;

Camat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepala daerah melalui sekretaris daerah:

## 2. Sekretaris Kecamatan

Membantu camat dalam hal mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kecamatan, pengelolaan administrasi keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat



kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Uraian Tugas:

Membantu Camat dalam hal:

- a. Merencanakan operasional perumusan program kerja di lingkungan sekretariat Kecamatan sesuai dengan program utama yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan / program kerja yang dilakukan oleh perangkat kecamatan berdasarkan rencana strategis (Resnstra) dan rencana kerja (Renja) kecamatan sebagai pedoman pelaksana tugas.
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk pengelolaan administrasi keuangan, surat–menyurat, Kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing sub bagian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien dan tidak terjadi kesalahan.
- d. Mengatur pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kecamatan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi kecamatan
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan secretariat kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.

- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan secretariat kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai laporan pertanggung jawaban dan akuntabilitas secretariat kecamatan
- g. Melaksanakan tugas kadinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai kecamatan yang selanjutnya dilaporkan kepada camat
- i. Menyiapkan bahan rapat camat dan keperluan ruang rapat yang dilaksanakan kecamatan
- j. Menyusun rencana kerja secretariat
- k. Menyelenggarakan data dan informasi perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas-tugas kecamatan
- l. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- m. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan kecamatan
- n. Meyelenggarakan upaya pemecahan masalah kecamatan dan pengaduan / keluhan masyarakat yang berkoordinasi dengan camat
- o. Menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan kecamatan
- p. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja kecamatan
- q. Mengkoordinasi penyelenggaraan tugas satuan organisasi.

### 3. Seksi Pemerintahan

- 1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas mempunyai tugas Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi;
  - a. Penyusunan Program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan
  - b. Penyusunan program dan pembinaan administrasi di bidang pertahanan/perijinan
  - c. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
  - d. Penyusunan program dan pembinaan social politik, idiologi negara dan dan kesatuan bangsa dan kemasyarakatan
  - e. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pemilihan/pilkada umum sesuai ketetntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - f. Pengkoordinasian UPTD/instansi tingkat kecamatan
  - g. Penyiapan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa dan Anggota BPD diwilayah kerjanya
  - h. Pembinaan terhadap panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

#### 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
  - b. Pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati serta peraturan di wilayah kerjanya
  - c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama
  - d. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### 5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- 1) Seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya

- b. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana desa/kelurahan dan pengembangan perekonomian desa/kelurahan
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan dan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- d. Pembantuan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak-pajak lainnya diwilayah kerjanya
- e. Pembinaan, pengembangan serta pemantauan terhadap perkembangan perindustrian dan perdagangan, pertambangan dan energi, perkoperasian, UKM dan golongan Ekonomi lemah
- f. Pengkoordinasian program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan Pembangunan swadaya masyarakat
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### 6. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum dan perlengkapan.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian

- c) Memberikan pelayanan tata naskah dinas, kearsipan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, dan kehumasan serta perlengkapan
- d) Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat / ruang pertemuan, komunikasi, sarana dan prasarana kantor
- e) Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya
- f) Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya
- g) Melaksanakan pemrosesan legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya
- h) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian
- i) Mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan
- j) Memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi / hukuman, pemberhentian / pensiun dan pendidikan serta pelatihan pegawai
- k) Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja
- l) Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengadministrasian umum surat masuk dan keluar
- m) Melakukan evaluasi hasil rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan sesuai ketentuan jam kerja

- n) Membimbing, memberi petunjuk dan arahan kepada staf dalam mengolah data kepegawaian
- o) Menginventarisir dan memeriksa berkas Pegawai yang akan naik pangkat, cuti, pensiun, berkala dll
- p) Membuat laporan dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas sub bagian
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 7. Seksi Pelayanan Umum

- 1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pelayanan umum
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan inventarisasi kekayaan desa/kelurahan
  - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi
  - c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum
  - d. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

#### 8. Kasubag Umum dan Kepegawaian

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum dan perlengkapan.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian
- c) Memberikan pelayanan tata naskah dinas, kearsipan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, dan kehumasan serta perlengkapan
- d) Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat / ruang pertemuan, komunikasi, sarana dan prasarana kantor
- e) Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya
- f) Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya
- g) Melaksanakan pemrosesan legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya
- h) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian
- i) Mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan



- j) Memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi / hukuman, pemberhentian / pensiun dan pendidikan serta pelatihan pegawai
- k) Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja
- l) Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengadministrasian umum surat masuk dan keluar
- m) Melakukan evaluasi hasil rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan sesuai ketentuan jam kerja
- n) Membimbing, memberi petunjuk dan arahan kepada staf dalam mengolah data kepegawaian
- o) Menginventarisir dan memeriksa berkas Pegawai yang akan naik pangkat, cuti, pensiun, berkala dll
- p) Membuat laporan dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas sub bagian
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan kecamatan secara professional sesuai dengan kebutuhan, dan kelompok jabatan fungsional ini dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada camat.

## 10. Kegiatan Pokok Organisasi

Yang dimaksud kegiatan pokok organisasi dalam sub ini adalah bentuk kegiatan yang menjadi pedoman Kecamatan Botu Pingge dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi telah diamanatkan, baik dalam peraturan daerah maupun dalam peraturan Bupati.

### 4.2. Hasil Penelitian

Sebelum instrumen diberikan ke responden, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi kuesioner bahwa kuesioner tersebut benar-benar dapat dipercaya. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner.

#### 4.2.1 Hasil uji validitas kuesioner

Uji validitas kuesioner dalam penelitian ini, dihitung dengan cara membandingkan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan tabel nilai koefisien ( $r_o$ ) pada taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95%. Karena skala pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, maka uji validitas menggunakan korelasi *product moment*. Instrumen dikatakan valid dengan menggunakan kriteria apabila nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , dan sebaliknya, jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka instrument dikatakan tidak valid.

Tabel 4.1 Hasil uji validitas komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih

Variabel	No. Item	r hitung	r tabel	Keterangan
komunikasi politik partai (variabel X)	1	0.722	0,334	valid
	2	0.761	0,334	valid
	3	0.694	0,334	valid
	4	0.667	0,334	valid
	5	0.579	0,334	valid
perilaku pemilih (variabel Y)	1	0.676	0,334	valid
	2	0.802	0,334	valid
	3	0.706	0,334	valid
	4	0.705	0,334	valid
	5	0.691	0,334	valid
	6	0.741	0,334	valid
	7	0.771	0,334	valid

Sumber: hasil olah data statistik, 2025

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil uji validitas kuesioner, di mana kuesioner yang diedarkan terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu variabel X dan Y, yakni 5 pertanyaan untuk variabel X dan 7 pertanyaan untuk variabel Y, yang kesemuanya telah dijawab oleh 37 responden. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan variabel X dan Y memiliki  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$  ( $r \text{ hitung}$  lebih besar dari  $r \text{ tabel}$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid.

#### 4.2.1. Hasil uji reliabilitas

Setelah kuesioner memiliki validitas, untuk selanjutnya dilakukan uji reliabilitas kuesioner. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode cronbach's alpha, dengan ketentuan jika nilai cronbach's alpha lebih besar daripada nilai koefisien korelasi yakni 0,60, maka kuesioner dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas, yakni:

Tabel 4.2 Hasil uji reliabilitas komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih

Variabel	Jumlah pertanyaan	Nilai koefisien reliabilitas	Nilai cronbach's alpha
komunikasi politik partai (variabel X)	5	0,60	0.863
perilaku pemilih (variabel Y)	7	0,60	0.907

Sumber: hasil olah data statistik, 2025

Pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa ada 5 pertanyaan untuk mengukur variabel X (komunikasi politik partai), dan ada 7 pertanyaan untuk mengukur variabel Y (perilaku pemilih). Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai cronbach's alpha komunikasi politik partai dan perilaku pemilih, lebih besar daripada nilai koefisien reliabilitas, yakni 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan untuk mengukur komunikasi politik partai dan perilaku pemilih, dikatakan reliabel.

### 4.3. Deskripsi Variabel

Dalam penelitian ini akan digambarkan dua variabel penelitian yakni komunikasi politik partai dan perilaku pemilih. Setelah kuesioner dikatakan valid dan reliabel, kuesioner diberikan kepada responden untuk ditanggapi. Terdapat 37 responden yang telah memberikan tanggapan, yang hasilnya adalah sebagai berikut.

#### 4.3.1. Komunikasi politik partai

Komunikasi politik partai merupakan variabel pertama yang terdiri atas lima pertanyaan dan telah dijawab oleh 37 responden, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Tanggapan responden tentang komunikasi politik partai

Jawaban	Pertanyaan 1		Pertanyaan 2		Pertanyaan 3	
	F	%	F	%	F	%
SANGAT SETUJU (SS)	4	10.8	5	13.5	10	27.0
SETUJU (S)	16	43.2	16	43.2	16	43.2
KURANG SETUJU (KS)	15	40.5	15	40.5	10	27.0
TIDAK SETUJU (TS)	2	5.4	1	2.7	1	2.7
SANGAT TIDAK SETUJU (STS)	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>
Jawaban	Pertanyaan 4		Pertanyaan 5			
	F	%	F	%		
SANGAT SETUJU (SS)	10	27.0	13	35.1		
SETUJU (S)	20	54.1	18	48.6		
KURANG SETUJU (KS)	7	18.9	6	16.2		

TIDAK SETUJU (TS)	0	0	0	0
SANGAT TIDAK SETUJU (STS)	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>

Sumber: hasil olah data statistik, 2025

Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 1 tentang partai politik menugaskan kadernya yang profesional dan memiliki reputasi baik sebagai juru kampanye, dapat diketahui bahwa sebanyak 4 (10,8%) responden mengatakan sangat setuju, 16 (43,2%) mengatakan setuju, 15 (40,5%) mengatakan kurang setuju, dan 2 (5,4%) mengatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa partai politik sudah menugaskan kadernya yang profesional dan memiliki reputasi baik sebagai juru kampanye, namun masih cukup besar responden yang mengatakan kurang setuju.

Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 2 tentang pesan politik yang disampaikan oleh tokoh partai, dapat dipahami dengan baik, dapat diketahui bahwa sebanyak 5 (13,8%) responden mengatakan sangat setuju, 16 (43,2%) mengatakan setuju, 15 (40,5%) mengatakan kurang setuju, dan 1 (2,7%) mengatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa pesan politik yang disampaikan oleh tokoh partai, sudah dapat dipahami dengan baik, namun masih cukup besar responden yang mengatakan kurang setuju.

Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 3 tentang partai politik menggunakan media massa (seperti radio, surat kabar, majalah, dan televisi) dan efektif dalam kampanye, dapat diketahui bahwa sebanyak 10 (10,8%) responden mengatakan sangat setuju, 16 (43,2%) mengatakan setuju, 10 (27,0%) mengatakan kurang setuju, dan 1 (2,7%) mengatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa partai politik menggunakan media massa (seperti radio, surat kabar, majalah, dan televisi) dan efektif dalam kampanye.

Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 4 tentang masyarakat selaku penerima pesan politik dapat memahami apa yang disampaikan juru kampanye partai, dapat diketahui bahwa sebanyak 10 (27,0%) responden mengatakan sangat setuju, 20 (54,1%) mengatakan setuju, dan 7 (18,9%) mengatakan kurang setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat selaku penerima pesan politik sudah dapat memahami apa yang disampaikan juru kampanye partai.

Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 5 tentang masyarakat memiliki pengetahuan dan berminat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, dapat diketahui bahwa sebanyak 13 (35,1%) responden mengatakan sangat setuju, 18 (48,6%) mengatakan setuju, dan 6 (16,2%) mengatakan kurang setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan berminat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah.

#### 4.3.2. Perilaku pemilih

Perilaku pemilih merupakan variabel pertama yang terdiri atas tujuh pertanyaan dan telah dijawab oleh 37 responden, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Tanggapan responden tentang perilaku pemilih

Jawaban	Pertanyaan 1		Pertanyaan 2		Pertanyaan 3		Pertanyaan 4	
	F	%	F	%	F	%	F	%
SANGAT SETUJU (SS)	19	51.4	2	5.4	17	45.9	6	16.2
SETUJU (S)	11	29.7	18	48.6	14	37.8	17	45.9
KURANG SETUJU (KS)	6	16.2	16	43.2	6	16.2	13	35.1
TIDAK SETUJU (TS)	1	2.7	1	2.7	0	0	1	2.7
SANGAT TIDAK SETUJU (STS)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>
Jawaban	Pertanyaan 5		Pertanyaan 6		Pertanyaan 7			
	F	%	F	%	F	%		
SANGAT SETUJU (SS)	11	29.7	18	48.6	17	45.9		
SETUJU (S)	16	43.2	14	37.8	17	45.9		
KURANG SETUJU (KS)	10	27.0	5	13.5	3	8.1		
TIDAK SETUJU (TS)	0	0	0	0	0	0		
SANGAT TIDAK SETUJU (STS)	0	0	0	0	0	0		
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>		

Sumber: hasil olah data statistik, 2025



Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 1 tentang ikut serta menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, dapat diketahui bahwa sebanyak 19 (51,4%) responden mengatakan sangat setuju, 11 (29,7%) mengatakan setuju, 6 (16,2%) mengatakan kurang setuju, dan 1 (2,7%) mengatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah ikut serta menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, namun masih banyak responden yang mengatakan kurang setuju.

Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 2 tentang ikut mengawasi hasil perhitungan suara pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, dapat diketahui bahwa sebanyak 2 (5,4%) responden mengatakan sangat setuju, 18 (48,6%) mengatakan setuju, 16 (43,2%) mengatakan kurang setuju, dan 1 (2,7%) mengatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah ikut mengawasi hasil perhitungan suara pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, namun masih banyak responden yang mengatakan kurang setuju.

Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 3 tentang ikut serta dalam kegiatan protes karena terdapat pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah, dapat diketahui bahwa sebanyak 17 (45,9%) responden mengatakan sangat setuju, 14 (37,8%) mengatakan setuju, dan 6 (16,2%) mengatakan kurang setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu ikut serta dalam kegiatan protes karena terdapat pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah.

Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 4 tentang ikut melaporkan kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung calon kepala daerah, dapat diketahui bahwa sebanyak 6 (16,2%) responden mengatakan sangat setuju, 17 (45,9%) mengatakan setuju, 13 (35,1%) mengatakan kurang setuju, dan 1 (2,7%) mengatakan bahwa tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah ikut melaporkan kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung calon kepala daerah, namun masih banyak responden yang mengatakan kurang setuju.

Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 5 tentang ikut serta dalam melakukan penawaran politik pada proses pemilihan kepala daerah, dapat diketahui bahwa sebanyak 11 (29,7%) responden mengatakan sangat setuju, 16 (43,2%) mengatakan setuju, dan 10 (27,0%) mengatakan kurang setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut serta dalam melakukan penawaran politik pada proses pemilihan kepala daerah.

Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 6 tentang ikut mengsosialisasikan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon kepala daerah yang saya dukung, dapat diketahui bahwa sebanyak 18 (48,6%) responden mengatakan sangat setuju, 14 (37,8%) mengatakan setuju, dan 5 (13,5%) mengatakan kurang setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu ikut mengsosialisasikan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon kepala daerah yang saya dukung.

Tanggapan responden pada pertanyaan nomor 7 tentang ikut serta dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon kepala daerah yang didukungnya, dapat diketahui bahwa sebanyak 17 (45,9%) responden mengatakan sangat setuju, 17 (45,9%) mengatakan setuju, dan 3 (8,1%) mengatakan kurang setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu ikut serta dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon kepala daerah yang didukungnya.

#### 4.4. Hasil Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui besarnya korelasi dan pengaruh antara komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih. Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana, didapat hasil yakni.

Tabel 4.5 Model summary komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.855 <sup>a</sup>	.731	.723	2.16270

a. Predictors: (constant), Komunikasi Politik (variabel X)

b. Dependent variable: Perilaku Pemilih (variabel Y)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai korelasi disimbolkan dengan R yakni sebesar 0,855 atau 85,5%. Adapun nilai pengaruh disimbolkan dengan R Square yakni 0,731 atau 73,1%. Hal ini berarti sumbangan sebesar 0,731 atau 73,1% variabel perilaku pemilih (variabel Y) ini dijelaskan oleh variabel komunikasi politik partai (variabel X). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi politik partai

berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Botu Pingge sebesar 0,731 atau 73,1%.

Selanjutnya, dilakukan uji persamaan regresi dan hipotesis menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana untuk variabel komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih yang dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.6 Koefisien komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.756	2.378		2.421	.021
Komunikasi Politik (variabel X)	1.176	.121	.855	9.747	<b>.000</b>

a. Dependent Variable: Perilaku Pemilih (variabel Y)

Berdasarkan tabel hasil koefisien komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b \cdot X$$

$$\hat{Y} = 5,756 + 1,176 \cdot X$$

Arti dari persamaan struktural tersebut yakni bahwa konstanta sebesar 5,756 mengatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai komunikasi politik partai (variabel X), maka nilai perilaku pemilih (variabel Y) adalah 5,756. Koefisien regresi sebesar 1,176 mengatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) satu skor atau nilai komunikasi politik partai (variabel X) akan memberikan kenaikan skor sebesar 1,176.

Hipotesis yang diajukan dalam bentuk kalimat.

Ho: tidak terdapat pengaruh antara komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Botu Pingge.

Ha: terdapat pengaruh antara komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Botu Pingge.

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas *Sig*. Terlihat bahwa kolom *Sig* (signifikansi) pada tabel 4.6 coefficients variabel YX ternyata nilai probabilitas *Sig* = 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai  $0,05 > 0,000$ , maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien regresi adalah signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha: terdapat pengaruh antara komunikasi politik partai terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Botu Pingge.

#### **4.5. Pembahasan Hasil Penelitian**

Partisipasi politik masyarakat sangat menentukan keberhasilan proses demokrasi, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah. Untuk itu, partai politik selaku organisasi yang mengusung calon kepala dan wakil kepala daerah, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam proses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, karena telah menjadi simbol kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pembangunan lokal (Alfarobbi, 2024: 12). Hal yang sama juga telah disampaikan oleh Basri dalam Sastroatmojo (2017:98), mengatakan bahwa dalam memberikan pengetahuan mengenai politik, selain partai politik, sekolah dan keluarga, maka peran partai politik lah yang harus lebih di

utamakan dalam memberikan pendidikan tersebut. Karena partai politik merupakan organisasi yang beroperasi dalam sistem perpolitikan. Salah satu fungsi partai politik adalah fungsi partisipasi politik, dimana fungsi partisipasi adalah fungsi partai politik untuk membawa warga negara agar aktif dalam kegiatan perpolitikan. Jenis partisipasi politik yang ditawarkan oleh partai politik kepada warga negaranya adalah kegiatan kampanye, mencari dana bagi partai, memilih pemimpin, demonstrasi, dan debat politik. Dalam kegiatan partai politik ini untuk memberikan pendidikan politik dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan kampanye, mencari dana bagi partai, memilih pemimpin, demonstrasi, dan debat politik. Dengan itu, maka masyarakat pun mendapatkan pendidikan politik yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh partai politik ialah melakukan komunikasi politik kepada masyarakat untuk menyakinkan kepada warga bahwa calon yang mereka usung memiliki kapabilitas dan kompetensi untuk menjadi kepala dan wakil kepala daerah. Untuk mendapatkan kekuasaan politik yang memiliki legalitas formal, maka setiap warga negara yang ingin memilikinya harus mendapatkannya melalui kegiatan partisipasi politik dalam bentuk pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Pemilihan umum merupakan sarana yang tidak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokratis modern, seperti negara kita, Indonesia.

Oleh sebab itu, pemahaman rakyat tentang pemilihan umum terutama dalam konteks demokrasi yakni pemilihan umum dapat dipandang sebagai suatu prosedur

untuk mengumpulkan data-data tertentu. Makna pemilihan yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi dalam memperebutkan kekuasaan atau pengaruh yang dilakukan dengan norma etika sehingga sirkulasi politik atau pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara damai dan beradab. Lembaga tersebut adalah produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalam mengelola kekuasaan dimana kedaulatan rakyat menjadi sumber kekuasaan itu sendiri.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan, salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut. Simanullang, ddk (2023:87) mengatakan bahwa dalam pemilu terutama dalam perilaku pemilih masyarakat banyak sekali aspek aspek yang menjadi faktor masyarakat dalam memilih suatu calon kandidat. Perilaku pemilih dapat dikatakan adalah merupakan perilaku warga masyarakat untuk menentukan pilihannya yang menurutnya paling sesuai dengan keinginannya. Masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, akan membawa dampak/mempengaruhi suatu sistem politik yang responsif, baik pemerintah lokal atau pemerintah pusat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik partai berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Botu Pingge sebesar 0,731 atau 73,1%. Hal ini berarti bahwa komunikasi partai yang dilakukan partai politik dapat memberikan kontribusi pada perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurussa'adah dan Sumartias (2017) menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan bagian dari strategi politik untuk membangun citra partai yang inklusif dan menghilangkan citra partai yang eksklusif, menghilangkan stigma miring (stereotype) di masyarakat, membangun kerjasama dengan semua elemen bangsa, mendapat tempat di hati masyarakat, terciptanya kawasan baldatun toyyibatun warobbun ghofur, implememntasi slogan berkhimad untuk rakyat (pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan) yang semuanya merupakan bagian dari tujuan dakwah secara umum dan tujuan politik secara khusus.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berdasarkan indikator keomunikasi politik partai, masih terdapat indikator yang kurang maksimal yakni partai politik terkadang tidak menugaskan kadernya yang profesional dan memiliki reputasi baik sebagai juru kampanye, dan pesan politik yang disampaikan oleh tokoh partai, terkadang kurang dapat dipahami dengan baik oleh warga masyarakat. Hasil penelitian Sitorus (2015) menyimpulkan bahwa para komunikator berperan dalam dalam menyampaikan informasi dan pesan yang ingin disampaikan. Namun, hal ini kembali lagi kepada para penerima pesan atau khalayak apa yang dapat ia tangkap dan ambil dari penyampaian pesan tersebut. Dengan demikian tidak penting saluran



apa yang digunakan oleh komunikator namun yang terpenting adalah tercapainya maksud yang sebenarnya dari penyampaian pesan tersebut.

Kuatnya peran partai politik dalam sistem perpolitikan seharusnya diimbangi dengan program-program berorientasi masyarakat. Tanpa adanya peran aktif dari partai politik, maka partai politik tidak akan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat, padahal, partai politik memegang peranan penting dalam menentukan sikap atau keputusan politik di dalam lembaga legislatif melalui fraksinya masing masing. Besarnya peran partai politik mulai menggeser substansi representasi yang mulanya berada pada anggota dewan secara individu menjadi representasi kepada fraksi atau partai politik. Hasil penelitian Subakdi dan Prasetyo (2023) menyimpulkan bahwa strategi komunikasi politik dalam konteks pilkada, memiliki peran sentral dalam agenda meraih kemenangan, karena semakin baik strategi komunikasi yang telah dilakukan komunikator maka tingkat kepercayaan masyarakat dalam politik akan ikut menaik Dengan kata lain strategi komunikasi yang dilakukan oleh partai politik sifatnya persuasif, baik berupa ajakan untuk berdiri dipihak yang sama, ataupun ajakan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam keberlangsungannya sistem politik.

Hasil penelitian yang berdasarkan indikator perilaku politik pemilih, juga masih belum maksimal pada beberapa indikator, yakni masyarakat kurang ikut mengawasi hasil perhitungan suara pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, kurang melaporkan kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung calon kepala

daerah, serta kurang ikut serta dalam melakukan penawaran politik pada proses pemilihan kepala daerah. Untuk itu, komunikasi politik partai harus dimaksimalkan lagi karena melalui komunikasi politik akan dapat menimbulkan ikatan emosional pemilih tersendiri pada warga masyarakat pada calon kepala dan wakil kepala daerah. Lazarsfeld menjelaskan bahwa keputusan politik sering kali dipengaruhi oleh ikatan emosional dan lingkungan sosial pemilih, seperti keluarga, teman, atau kelompok agama. Pemilih emosional cenderung membuat pilihan berdasarkan perasaan simpati atau keterikatan terhadap kandidat tertentu, bukan pada pertimbangan rasional. Dalam konteks modern, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun koneksi emosional antara kandidat dan pemilih, sering kali melalui narasi yang menyentuh hati atau menonjolkan simbol- simbol identitas (Saputro, dkk, 2024:141).

Pada era multi partai sekarang ini, jika partai-partai politik saling bersaing sehat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, tentu akan menyenangkan masyarakat banyak dan sudah tentu sifat yang apatis terhadap partai politik akan terhindari yang pada akhirnya jutaan suara golput di setiap pemilu akan berkurang. Karena lewat partai politik seluruh elemen masyarakat baik petani, nelayan, buruh, pedagang, pengusaha bahkan masyarakat jelata sekalipun dapat menyampaikan aspirasinya guna untuk membangun bangsa ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Komunikasi politik partai berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Botu Pingge sebesar 0,731 atau 73,1%. Hal ini berarti bahwa komunikasi partai yang dilakukan partai politik dapat memberikan kontribusi pada perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah. Hasil penelitian berdasarkan indikator keomunikasi politik partai, masih terdapat indikator yang kurang maksimal yakni partai politik terkadang tidak menugaskan kadernya yang profesional dan memiliki reputasi baik sebagai juru kampanye, dan pesan politik yang disampaikan oleh tokoh partai, terkadang kurang dapat dipahami dengan baik oleh warga masyarakat. Kemudian, berdasarkan indikator perilaku politik pemilih, juga masih belum maksimal pada beberapa indikator, yakni masyarakat kurang ikut mengawasi hasil perhitungan suara pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, kurang melaporkan kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung calon kepala daerah, serta kurang ikut serta dalam melakukan penawaran politik pada proses pemilihan kepala daerah.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat diberikan saran, yakni:

- 1) Partai politik merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan demokrasi, karena merupakan organisasi terbesar ditengah-tengah masyarakat. Olehnya itu, partai politik hendaknya lebih aktif lagi memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, baik melalui kader partai dan jurkan kampanye yang memiliki publik speaking yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami penyampaian pesan disampaikan.
- 2) Dalam mewujudkan tatanan politik yang sehat, serta berlangsungnya pemilihan kepala dan wakil kepala yang baik di Kecamatan Botu Pingge, partai politik dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya sebagai mana fungsinya. Kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam bentuk partisiapsi politik harus digugah, agar mau bersama-sama untuk menggunakan hak pilihnya dalam setiap kegiatan pemilihan umum. Hal inilah yang perlu dilakukan oleh partai politik, karena lewat partai politik masyarakat dapat menyatukan aspirasi, pandangan, serta gagasan untuk membangun daerahnya, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proses demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarobbi, F. W. (2024). Civic Participation Pemilih Golongan Muda Pada Pemilu 2024 Di Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.
- Alfian. 2014. Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia.
- Armi, Zahlul. (2017). Strategi Komunikasi Politik Pasangan Calon Walikota Banda Aceh Pada Pilkada 2017 (Studi Pada Tim Pemenangan Aminullah Usman dan Zainal Arifin). Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Asshiddiqie, Jimly. (2018). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. PT. Rajagrafindo Persada.
- Bafadal, R. E. (2024). Peningkatan Partisipasi Memilih Pada Pemilukada 2024 dengan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan. Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri, 3(3), 176-187.
- Budiardjo, Miriam. 2019. Demokrasi di Indonesia . PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Creswell, J. W., & Wekke, I. S. (2020). Berpikir Seperti Peneliti Kualitatif.
- Fitriyah, dkk. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 1, 2021.
- Kamaruddin. (2015). Komunikasi Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Malikussaleh.
- Kumolo, T. (2020). Komunikasi Politik dan Pembangunan Demokrasi. Jakarta: Kompas.
- Miller, A. (2018). Political Influence and Voter Behavior. London: Sage Publications.
- Mulyana, D. (2019). Komunikasi Politik di Era Digital. Jakarta: Gramedia.
- Nimmo, Dan (2017). Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek (Edisi Terjemahan oleh Tjun Surjaman), Edisi Kedua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nurudin. (2014). *Sistem Komunikasi Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta
- Nurussa'adah, Erfina, dan Sumartias, Suwandi. (2017). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 5, No. 1, Juni 2017 hlm 43–52.
- Rachmat, Basuki, dan Esther. (2015). Perilaku pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan LI/Idyapraja*, l/ol XLII No. 2, Tahun 2016.
- Saputro, E. R, dkk.. (2024). Pendidikan Politik bagi Gen Z dalam Menyongsong Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Merauke. *Fundamentum: Jurnal Multidisiplin*, 2(4), 139-147.
- Sastroatmojo, Sudijono. (2017). *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press. Semarang.
- Simanullang, Alfon Apriel, dkk (2023). Analisis Perilaku Memilih Masyarakat Untuk Pemilu 2024 di Tinjau Dari Perilaku Pemilih Masyarakat Dalam Pilres 2019 (Studi Kasus Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin). *Majalah Ilmiah Methoda*, Volume 13, Nomor 2, Mei – Agustus 2023: 86-93 ISSN: 2088-9534 (media cetak) – ISSN: 2656-6931 (media online).
- Sitorus, Syahrul. (2015). Komunikasi Politik dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah. *JURNAL HIKMAH*, Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015.
- Subakdi, Handoyo, Prasetyo. (2023). Peranan Strategi Komunikasi Politik dalam Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat Serta Menjaga Perdamaian. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Vol. 5, No. 1, 2023.
- Surbakti, R. (2021). *Teori dan Praktek Perilaku Pemilih di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wring, D. (2020). *The Politics of Persuasion*. New York: Palgrave Macmillan.